

**KINERJA KEUANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH**



Skripsi Oleh :

**WIWIN LARASIWA**

**01101003032**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**2014**

R.25910/26471

S  
658.151.107

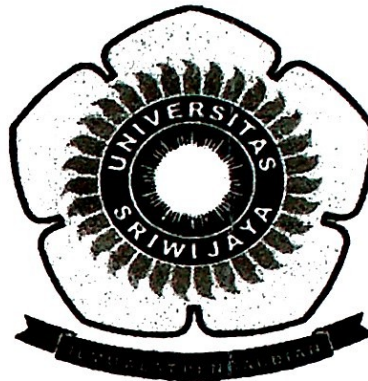
Wiw

K

2014

C, 141081.

**KINERJA KEUANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH**



Skripsi Oleh :

**WIWIN LARASIWA**

**01101003032**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih*

*Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**KINERJA KEUANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH**

Disusun oleh:


Nama : Wiwin Larasiwa  
NIM : 01101003032  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing


Tanggal : 17/9/2014

Ketua : 

(Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA)

NIP 195808281988101001

Tanggal : 28/3/2014

Anggota : 

(Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak., CA)

NIP 197802102001122001

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**KINERJA KEUANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH**

Disusun oleh :

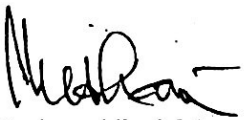
Nama : Wiwin Larasiwa  
NIM : 01101003032  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian / Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 11 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 11 Juni 2014

Ketua,



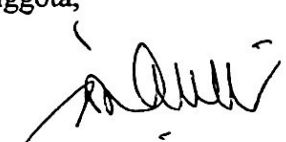
Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA  
NIP 19580828 198810 1 001

Anggota,



Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19780210 200112 2 001

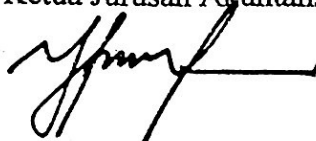
Anggota,



Mukhtaruddin, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP 19671210 199402 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA  
NIP. 19650816 199512 1 001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwin Larasiwa  
NIM : 01101003032  
Bidang Kajian / Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: Kinerja Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah

Pembimbing:

Ketua : Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA  
Anggota : Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 11 Juni 2014

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 12 Juni 2014

Pembuat Pernyataan,



Wiwin Larasiwa

NIM 01101003032

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Wiwin Larasiwa

NIM : 01101003032

Judul Skripsi : Kinerja Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tensesnya* dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 12 Juni 2014

Pembimbing Skripsi

Ketua,



Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak.  
NIP 195808281988101001

Anggota,



Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak.  
NIP 197802102001122001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Wa Allaisa Lil Insaani Illaa Maa Sa'aa.**

*“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An Najm, 53: 39)*

**Uu Laa Ika Lahum Nasiibum Mimmaa Kasabuu Wallaahu Sarii'ulhisaabi.**

*“Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (QS. Al Baqarah, 2: 202)*

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Orang tua tersayang
- Adik-adikku tersayang
- Sahabat-sahabatku tersayang
- Teman-teman Akuntansi '10
- Almamaterku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A., PhD, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universityas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak., Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Inten Meutia, S.E., M.Acc., Ak., sebagai dosen Pembimbing Akademik.
7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Kepala dan Staf karyawan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, terima kasih atas bantuan data yang telah diberikan.
9. Kedua orang tercinta, terima kasih atas do'a, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini baik moril maupun materil.
10. Saudaraku Yuyun Khatirina, S.E. dan Beben Damarano terima kasih atas dukungan, do'a dan motivasi yang telah kalian berikan.



11. Sahabat-sahabatku Eva, Nelsi, Tian, Fian, Zatin, Rena, Zakir, Riqky, Andre, Apri, Titin, Alif, Tante Ririn terima kasih atas saran dan kritiknya selama ini. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses kedepannya.
12. Teman sekosanku Ros, Shinta, Eva, Masyita terima kasih telah menemani hari-hariku selama hidup dikosan bersama kalian.
13. Terima kasih juga kepada Cece Venny yang telah setia menemani penulis dari awal sampai skripsi siap untuk diujikan.
14. Dan kepada semua teman-teman seangkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta kepada kakak tingkat terima kasih atas bantuannya selama ini.

Hanya ucapan terima kasih dan do'a yang bisa penulis berikan kepada semuanya untuk segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

Penulis

Wiwin Larasiwa

## RIWAYAT HIDUP

**Nama Mahasiswa** : Wiwin Larasiwa  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat/ Tanggal Lahir** : Pulau Harapan/20 Desember 1992  
**Agama** : Islam  
**Status** : Belum Menikah  
**Alamat Rumah (Orangtua)** : Jalan Palembang-Betung Km.32 Dusun 2  
RT/RW 006/002 Nomor. 186 Desa Pulau  
Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten  
Banyuasin  
**Alamat Email** : larasiwawiwin@yahoo.com

**Pendidikan Formal** :  
**Sekolah Dasar** : SD Negeri 3 Pulau Harapan  
**SLTP** : SMP Negeri 3 Banyuasin III  
**SMU** : SMA Negeri 1 Banyuasin III

**Pendidikan Non Formal** : Intensive English Course (IEC) Palembang  
**Pengalaman Organisasi** : Anggota Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa  
(BEM)  
Anggota Pengurus Ikatan Mahasiswa  
Akuntansi (IMA)

**Penghargaan Prestasi** : -

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Kinerja Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai penilaian dan perbandingan kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum dan sesudah pemekaran dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan uji beda *Paired Sample T Test*. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat di atasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
5. Orang tua tercinta, terima kasih atas do'a, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini baik moril maupun materil.

Inderalaya, 22 April 2014

Penulis

## ABSTRAK

### KINERJA KEUANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH

Oleh:  
Wiwin Larasiwa

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan membandingkan kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum dan sesudah pemekaran daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2000-2005. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan uji beda *Paired Sample T Test*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran (2000-2002) lebih baik dibandingkan sesudah pemekaran (2003-2005). Hal ini tercermin dari hampir seluruh hasil perhitungan rasio keuangan sebelum pemekaran (2000-2002) lebih besar dibandingkan sesudah pemekaran (2003-2005). Berdasarkan hasil uji beda rasio keuangan, maka didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran (2000-2002) dengan kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sesudah pemekaran (2003-2005).

***Kata kunci: Pengukuran Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan, Uji Beda Paired Sample T Test.***

## ABSTRACT

### KINERJA KEUANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH

Oleh:

**Wiwin Larasiwa; Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak.;**  
**Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak.**

*The aim of this research was to assess and compare the financial performance of Musi Banyuasin Regency before and after the region expansion. The research took place in Government of Musi Banyuasin Regency. The data used in this study was The Revenue and Expenditure Budget Realization in the fiscal year period 2000 to 2005. The method used was comparative descriptive by using the analysis of the financial ratios and different test Paired Sample T Test.*

*The results of this research showed that the financial performance of Musi Banyuasin Regency before expansion (since 2000 to 2002) was better than after expansion (since 2003 to 2005). It was proved that most of the results of the calculation of the financial ratios before expansion (since 2000 to 2002) were greater than after expansion (since 2003 to 2005). Based on the financial ratios of different test results, it showed that there was not significant difference between the financial performance Musi Banyuasin Regency before expansion (since 2000 to 2002) with financial performance Musi Banyuasin after expansion (since 2003 to 2005).*

***Keywords: The Measurement of Financial Performance, The Financial Ratio Analysis, Different Test Paired Sample T Test.***

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5.2. Rancangan Penelitian.....	9
1.5.3. Sumber Data.....	9
1.5.4. Metode Pengumpulan Data.....	10
1.5.5. Definisi Operasional Variabel.....	10
1.5.6. Metode Analisis Data.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1. Landasan Teori.....	16
2.1.1. Pengukuran Kinerja: Konsep dan Elemen .....	16
2.1.2. Efisiensi dan Efektivitas .....	22
2.1.3. Pemekaran Daerah .....	25
2.1.3.1. Pengertian Pemekaran Daerah .....	25
2.1.3.2. Tujuan Pemekaran Daerah.....	26

2.1.3.3. Dasar Hukum Pembentukan Daerah Otonom Baru	27
2.1.4. Penganggaran Sektor Publik	27
2.1.4.1. Pengertian Anggaran Sektor Publik	27
2.1.4.2. Fungsi Anggaran Sektor Publik	28
2.1.4.3. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik	30
2.1.4.4. Siklus Anggaran	32
2.1.5. Keuangan Daerah	34
2.1.5.1. Pengertian Keuangan Daerah	34
2.1.5.2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	35
2.1.5.3. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	36
2.1.6. Analisis Rasio Keuangan	38
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	39
2. Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran	42
3. Rasio Keserasian	43
4. Rasio Pertumbuhan	44
2.2. Penelitian Terdahulu	45
2.3. Kerangka Konseptual	48
2.4. Hipotesis	48

<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	<b>50</b>
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin	50
3.1.1. Sejarah Kabupaten Musi Banyuasin	50
3.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	54
3.1.3. Letak Geografis	55
3.1.4. Administrasi	56
3.1.5. Iklim	57
3.2. Demografi	57
3.2.1. Pertumbuhan Penduduk	57
3.2.2. Persebaran dan Kepadatan	58
3.3. Pemerintahan	58

3.3.1. Dasar Pembentukan Aparatur Negara.....	58
3.3.2. Visi dan Misi.....	59
3.4. Struktur Organisasi.....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
4.1. Hasil.....	76
4.1.1. Analisis Rasio Keuangan .....	76
4.1.1.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	76
4.1.1.2. Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	78
4.1.1.3. Rasio Keserasian.....	80
4.1.1.4. Rasio Pertumbuhan .....	81
a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	82
b. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan .....	83
c. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin.....	84
d. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan .....	85
4.2. Pembahasan .....	87
4.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	87
4.2.2. Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	91
4.2.3. Rasio Keserasian.....	94
4.2.4. Rasio Pertumbuhan .....	98
a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	98
b. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan .....	100
c. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin.....	102
d. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan .....	104
4.3. Pengujian Hipotesis.....	107
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
5.1 Kesimpulan.....	118
5.2 Saran.....	122
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	123



5.4 Implikasi .....	124
Daftar Pustaka .....	125
Lampiran-lampiran.....	128

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1998-2005.....	3
Tabel 2.1. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah.....	41
Tabel 2.2. Kriteria Kinerja Efisiensi Anggaran.....	42
Tabel 3.1. Data APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1995-2012.....	55
Tabel 3.2. Nama, Jumlah Desa/Kelurahan, dan Luas Wilayah per Kecamatan .....	57
Tabel 4.1. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah.....	77
Tabel 4.2. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah.....	78
Tabel 4.3. Perhitungan Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah.....	79
Tabel 4.4. Kriteria Kinerja Efisiensi Anggaran.....	79
Tabel 4.5. Perhitungan Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah .....	81
Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah .....	83
Tabel 4.7. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah.....	84
Tabel 4.8. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah.....	85
Tabel 4.9. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah.....	86
Tabel 4.10. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran .....	87
Tabel 4.11. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk Variabel Sebelum	

dan Sesudah Pemekaran .....	107
Tabel 4.12. Statistik Deskriptif .....	108
Tabel 4.13. Hasil Uji Beda dengan Paired T-Test.....	110
Tabel 4.14. Kesimpulan atas Uji Hipotesis .....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Hubungan Efisiensi dan Efektivitas .....	25
Gambar 2.2. Kerangka Konseptual .....	48
Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.....	61
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin .....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000-2005 .....	128
Lampiran 2 Daftar Kode Rasio Keuangan dalam Pengujian Hipotesis .....	140

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang ini memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Pada dasarnya sumber-sumber penerimaan di antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Misalnya saja, ada daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah lainnya yang menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya.

Salah satu dampak yang muncul pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas adalah terjadinya pemekaran daerah. Berdasarkan

pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-Undang di atas menjelaskan tentang pemekaran daerah bahwa suatu provinsi atau kabupaten/kota dapat dimekarkan menjadi dua daerah atau lebih. Dengan demikian maka terbentuklah daerah-daerah baru sebagai akibat dari terjadinya pemekaran daerah.

Tujuan pemekaran diharapkan mampu mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah saja. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah-daerah belum berkembang tersebut.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah yang mengalami pemekaran pada tanggal 10 April 2002 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan. Ini berarti secara resmi Kabupaten Musi Banyuasin terpecah menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Banyuasin sebagai Daerah Otonom Baru.

Terbentuknya daerah baru pasca pemekaran daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian dan sumber-sumber pendapatan bagi daerah induknya. Daerah yang baru terbentuk akan menerima sebagian aset dari wilayah induknya untuk menjalankan roda pemerintahan, sebagaimana diatur dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : “Barang milik daerah atau yang dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk”. Akibat penyerahan aset sebagaimana dijelaskan dalam Kepmendagri di atas menyebabkan berkurangnya aset dan sumber-sumber pendapatan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satunya adalah berkurangnya penerimaan PAD yang akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tersebut dan pada akhirnya berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan Kabupaten yang bersangkutan.

Dampak yang dirasakan Kabupaten Musi Banyuasin pasca pemekaran salah satunya dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1999-2005

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Peningkatan/Penurunan (Rp)
1999	4.523.496.000,00	-
2000	4.875.245.000,00	351.749.000,00
2001	8.826.895.811,45	3.951.650.811,45
2002	27.911.184.944,21	19.084.289.132,76
2003	22.866.811.046,54	(5.044.373.897,67)
2004	9.491.120.479,42	(13.375.690.567,12)
2005	13.514.721.724,21	4.023.601.244,79

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2014



Dari tabel di atas dapat diketahui pada beberapa tahun sebelum pemekaran (tahun 1999 sampai dengan tahun 2002) penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat, yaitu pada tahun 2000 terjadi peningkatan sebesar Rp351.749.000,00 dibandingkan PAD tahun 1999. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan sebesar Rp3.951.650.811,45 dibanding PAD tahun 2000 dan pada tahun 2002 terjadi peningkatan drastis sebesar Rp19.084.289.132,76 dibandingkan dengan PAD tahun 2001. Sementara itu, pada beberapa tahun setelah pemekaran (di atas tahun 2002) terjadi penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yaitu pada tahun 2003 terjadi penurunan sebesar Rp5.044.373.897,67 dibandingkan PAD tahun sebelumnya dan pada tahun 2004 juga terjadi penurunan drastis PAD sebesar Rp13.375.690.567,12. Pada tahun 2005 mulai terjadi peningkatan PAD sebesar Rp4.023.601.244,79. Hal ini dikarenakan kekayaan-kekayaan daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah diserahkan sebagian kepada Kabupaten baru hasil pemekaran yang menyebabkan PAD kabupaten induk turun terutama di sektor pajak dan retribusi daerah. Dan pada waktu itu Kabupaten Musi Banyuasin belum mampu mendayagunakan kekayaan-kekayaan daerahnya secara optimal.

Merujuk kepada uraian di atas maka menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja

keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Penggunaan analisis rasio keuangan secara luas telah digunakan oleh *private sector*, sedangkan pada lembaga publik penggunaannya masih terbatas. Padahal dari hasil analisis dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah dan diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas/pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Halim & Kusufi, 2012).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Latar belakang masalah dalam studi akuntansi dan keuangan banyak bersumber dari teoritis dengan melakukan review terhadap penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya Hidayat, Pratomo, & Harjito (2007) meneliti tentang

*Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara* menghasilkan kesimpulan bahwa dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran anggaran, Kabupaten Mandailing Natal, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Barat secara rata-rata mengalami pertumbuhan pengeluaran lebih besar dari pertumbuhan penerimaan. Sedangkan Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Padang Sidempuan mengalami pertumbuhan pengeluaran yang lebih besar dari pengeluarannya. Dilihat dari indikator kinerja PAD, kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan PAD yang positif tetapi masih relatif kecil peranannya dalam struktur APBD. Dari peta kemampuan keuangan (metode kuadran) mengindikasikan ketidaksiapan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dan masih kurangnya kemandirian dalam berotonomi.

Selain itu, dalam penelitian Mariani (2013) tentang *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah. 2). Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah. 3). Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran daerah. 4). Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran sesudah pemekaran daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada analisis uji beda kinerja keuangan yang dilakukan terhadap pendapatan dan belanja yang terdapat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peneliti menggunakan uji beda *Paired Sample T-Test*, sedangkan Mariani (2013) menggunakan uji beda *Independent Sample T-Test*. Alasan peneliti menggunakan uji beda *Paired Sample T-Test* karena sampel yang digunakan adalah sampel berpasangan yaitu dengan membandingkan kinerja keuangan sebelum pemekaran dengan kinerja keuangan sesudah pemekaran, sedangkan Mariani (2013) menggunakan uji beda *Independent Sample T-Test* karena sampel yang ia digunakan adalah bebas.

Berdasarkan informasi di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai **“Kinerja Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran daerah.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran daerah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti empiris mengenai efektivitas atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin di periode selanjutnya.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pihak-pihak yang berkecimpung dalam penelitian bidang akuntansi.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk mempermudah pemecahan masalah dan agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada kinerja keuangan Kabupaten Musi

Banyuasin sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran dengan menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2000-2005.

### **1.5.2. Rancangan Penelitian**

Jenis rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif komparatif. Metode deskriptif menurut Nazir (2003) adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pengertian, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menilai dan membandingkan kinerja keuangan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum pemekaran (2000-2002) dan sesudah pemekaran (2003-2005) sehingga dapat dikatakan penelitian ini merupakan suatu studi komparatif.

### **1.5.3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat melalui media perantara atau yang telah diolah. Data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dalam hal ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2000-2005. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin

#### **1.5.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data terdiri dari:

##### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:158). Data dalam penelitian ini berasal dari laporan realisasi APBD daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2000-2005.

##### **b. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian menggunakan pustaka sebagai sumber data dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang ada. Pengertian pustaka di sini adalah semua hal yang tertuang tidak hanya berupa sesuatu yang tercetak dan tersimpan di perpustakaan, tetapi juga yang berada di dunia maya (Syamsul, 2006:23).

#### **1.5.5. Definisi Operasional Variabel**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan meluasnya permasalahan yang diangkat, maka perlu adanya batasan-batasan pengertian operasional variabel sebagai berikut:

a. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur (Ronald & sarmiyatiningsih, 2010).

b. Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber keuangan yang diperlukan daerah (Halim & Kusufi, 2012).

d. Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

e. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal (Halim & Kusufi, 2012).

f. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang



telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya untuk masing-masing sumber pendapatan dan pengeluaran (Halim & Kusufi,2012).

### 1.5.6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2000-2005 dan juga menggunakan uji beda untuk dua sampel yang berpasangan (*Paired Sample T Test*).

#### a. Analisis Rasio Keuangan

Menghitung rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan rasio-rasio berikut.

##### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

##### 2. Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran

$$= \frac{\text{Total Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

##### 3. Rasio Keserasian

###### 3.1. Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

###### 3.2. Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

#### 4. Rasio Pertumbuhan

##### 4.1. Rasio Pertumbuhan PAD

$$= \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

##### 4.2. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

##### 4.3. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Rutin } X_{n-1}} \times 100\%$$

##### 4.4. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_{n-1}} \times 100\%$$

#### b. Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan

Data penelitian ini sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah data penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Bila hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang normal dari rasio-rasio keuangan maka terhadap rasio tersebut digunakan uji beda *Paired Sample T Test*. Apabila hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang tidak normal maka digunakan uji *Wilcoxon Sign-Rank*.

## **1.6. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyajikannya dalam lima bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya penelitian tersebut. Selain itu, di dalam bab ini juga dipaparkan perumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti definisi pemekaran daerah, penganggaran sektor publik, keuangan daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, analisis rasio keuangan daerah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai gambaran umum Kabupaten Musi Banyuasin dan gambaran umum dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis terhadap data yang telah diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini. Analisis yang dilakukan dalam bab ini mencakup analisis deskriptif komparatif dan pengujian hipotesis serta pembahasan atas hasil analisis tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini, yang menguraikan kesimpulan dari Bab IV serta saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi penelitian mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Azhar, Karya Satya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Tesis tidak diterbitkan. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik Banyuasin. 2001. *Musi Banyuasin dalam Angka 2001*. Musi Banyuasin : BPS Musi Banyuasin.
- Badan Pusat Statistik Banyuasin. 2002. *Musi Banyuasin dalam Angka 2002*. Musi Banyuasin : BPS Musi Banyuasin.
- Badan Pusat Statistik Banyuasin. 2003. *Musi Banyuasin dalam Angka 2003*. Musi Banyuasin : BPS Musi Banyuasin.
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Tahun 1998/1999-1999/2000*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Burhanudin. 2003. Pengukuran Prestasi dan Penilaian Kriteria Prestasi Perusahaan Daerah Air Minum (Kajian Kes di PDAM Tirta Musi Palembang, Indonesia). *Tesis*. Fakultas Pengurusan dan Perniagaan. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan RI. 2012. Data Keuangan Daerah. Diambil pada tanggal 5 januari 2013 dari: <http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/sebelum-ta-2006>.
- Dwijayanti, Retno dan Ruserlistyanti. 2013. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 12 No.1.
- Hadi, Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta : EKONISIA.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hasibuan, Malayu S.P. 1984. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung
- Hidayat, Paidi., Pratomo, Wahyu A., dan Hartjito, DA.. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Hal 213-222.
- International Federation of Accountants. 1994. *Proposed Study Performance Reporting by Government Business Enterprise: An Exposure Draft*. New Jersey. Mc. Graw-Hill.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mariani, Lidia. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Artikel Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Miranda, dan Tunggal, Amin Widjaja . 2003. " *A to Z*". Jakarta: Harvindo.
- Nazir, M. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Paat, Selly. Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD Antara Pemerintah Kota Tomohon dengan Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3, 851-862.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri dalam Negeri No.42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Robertson, Gordon. "Revie Kinerja". *Lokakarya Revie Kinerja*. BPKP dan Executive Education. 2002.
- Ronald, Andreas dan Sarmiyatiningsih, Dwi. 2010. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 1 No. 1, 31-42.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang.
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Malang: UMM Press.